

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kotamadya Ujung Pandang atau yang saat ini disebut sebagai Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar terjadi pada tahun 1999 sesuai yang tertuang dalam PP No. 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar¹. Kotamadya Ujung Pandang secara geografis terletak di bagian Barat Daya Pulau Sulawesi, berada di wilayah pesisir pantai, berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan diapit oleh aliran Sungai Tallo dan Sungai Je'neberang yang membuat kota ini juga disebut sebagai kota pantai.²

Kota pantai merupakan kawasan perkotaan yang berada ditepian air, seperti laut, danau, maupun sungai, yang memiliki karakteristik yang terbuka dan multifungsi³. Sama halnya dengan Kotamadya Ujung Pandang, kota ini merupakan salah satu dari beberapa wilayah yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pantai. Perkembangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, tetapi juga oleh faktor-faktor

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.



Darmawan Mas'ud Rahman, et.al. *Pertumbuhan Kota Pantai Makassar*. andang: Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. 1994), 9.

Muhammad Amrin Ms. Conoras. "Penerapan Prinsip Waterfront City Pada isata Pantai Ake Sahu Kota Tidore Kepulauan". *Jurnal Archipelascope*, 15

lain seperti dinamika politik, pertumbuhan ekonomi, dan budaya masyarakat yang turut mendorong lahirnya identitas Ujung Pandang sebagai sebuah kota pantai.⁴

Kotamadya Ujung Pandang memiliki luas areal 175,77 km persegi dengan panjang garis pantai 52,8 km. Oleh karena itu sebagian dari kecamatan yang berada di Kotamadya Ujung Pandang merupakan wilayah pesisir. Kotamadya Ujung Pandang sebagai kota pantai tentunya memiliki tuntutan seperti kota pada umumnya yaitu pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagai kota pantai, Kotamadya Ujung Pandang tidak terlepas dari permasalahan akses air bersih. Pada tahun 1970, penduduk Kotamadya Ujung Pandang untuk memperoleh air bersih sebagian besar bersumber dari sumur, kran umum dan melalui tenaga buruh angkat air dan sebagian kecil lainnya bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi itu mempertegas bahwa kurangnya sarana terkait penyediaan air bersih di Kotamadya Ujung Pandang.⁵

Selain masalah akses sumber air bersih bagi penduduk, faktor lain yang juga mempengaruhi akses terhadap air bersih adalah peningkatan jumlah penduduk di Kotamadya Ujung Pandang. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan tidak seimbangnya antara jumlah populasi dan kebutuhan air bersih. Karena peningkatan



Rahman, *Pertumbuhan Kota*, 10-16.

Ilham, "Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-*al Sejarah*. Vol. 1, No. 2, 2018, 20-30.

jumlah penduduk akan mempengaruhi beberapa hal seperti permukiman, dan pertanian termasuk kebutuhan air bersih.⁶

Perkembangan jumlah penduduk di Kotamadya Ujung Pandang dalam rentan tahun 1971-1992 akhir memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, tercatat jumlah penduduk Kota Madya Ujung Pandang pada tahun 1971 (setelah pemekaran) adalah 434.809 ribu jiwa dan pada tahun 1992 akhir mencapai 1.000.328 ribu jiwa⁷. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kedatangan penduduk dari wilayah lain akibat dari kebijakan migrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, Kotamadya Ujung Pandang memiliki daya tarik tersendiri seperti posisi yang strategis karena sebagai wilayah penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.⁸ Dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan tentunya berdampak pada kebutuhan akan permukiman dan tentunya air bersih.⁹

Permasalahan ketersediaan air di Kotamadya Ujung Pandang sudah menjadi persoalan yang cukup kompleks dari tahun ke tahun, begitupun hari ini. Berdasarkan survei pada tahun 1970an akhir, penduduk Kotamadya Ujung Pandang memperoleh air bersih dari berbagai sumber, seperti air ledeng 2,9%, kran umum 53,9%, tukang air

⁶ Ni Made Sukartini, Samsubar. 2016. Akses Air bersih di Indonesia. JKET. No. 9. Vol. 2, 89-98.

⁷ Badan Pusat Statistik. “Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka 1992”, 25.

⁸ Sahajuddin, Potret Pedagang Kaki Lima: Pergulatan Ekonomi di Pasar al Makassar (1998-2006), (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2015),19.

Anwar F.M, Dade Mahzuni, “Air dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih Di :bon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19-20)”. *INNOVATIVE: Journal Of ience Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, 5304



pikulan 8,3% dan sumur pribadi 34,2%.¹⁰ Survei tersebut dapat dipastikan bahwa jumlah ketersediaan air di Kota Madya Ujung Pandang pada periode tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk di Kota Madya Ujung Pandang. Kemudian survei Badan Pusat Statistik tahun 1984 bahwa hanya terdapat sebagian kecil penduduk yang menikmati air dari Perusahaan Daerah Air Minum.¹¹

Air bersih sudah menjadi suatu permasalahan utama ditengah-tengah penduduk Kotamadya Ujung Pandang sekitar tahun 1970an. Pada masa itu PDAM sebagai layanan penyedia air bersih hanya dapat mendistribusikan air bersih melalui 3 (tiga) instalasi dengan kapasitas produksi air bersih 1090 l/detik melayani sekitar 40.967 rumah tangga atau hanya sebagian kecil dari sekitar 200 ribu jumlah rumah tangga.¹² Pada tahun 1993, layanan penyedia air bersih Kota Madya Ujung Pandang meningkatkan distribusi air bersih melalui posko, mobil tangki dan juga menyampaikan langsung melalui telepon kunci.¹³

Permasalahan karena tidak meratanya pendistribusian air bersih, mengakibatkan penduduk Kotamadya Ujung Pandang hanya memanfaatkan sumur pribadi atau bak-

¹⁰ Ilham, "Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. 4, No. 1, 2019, 15-35.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). "*Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 1984*".



Badan Pusat Statistik. "*Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka Tahun 33*".

"PDAM Ujung Pandang Tingkatkan Distribusi Air Bersih". *Berita Yudha*. 5 September 1993.

bak penampungan air yang disediakan sebagai solusi atas kurangnya persediaan air bersih.¹⁴ Namun juga sering kali mengalami permasalahan, pada tahun 1993, terdapat 3 permukiman, yaitu Panampu, Jongaya dan Sinrijala dengan kualitas air yang tidak sesuai dengan standar air bersih akibat dari pembuangan limbah cair masyarakat masuk ke ketiga drainase yang berada dimasing-masing permukiman dan akibat pasang surut air laut yang masuk kedalam saluran yang memperburuk kualitas air¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat dinamika persoalan air bersih yang terjadi di penduduk Kotamadya Ujung Pandang maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penduduk dan permasalahan air bersih yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang serta melihat pengaruh serta dampak yang ditimbulkan dari kondisi geografis, kemudian untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk Kota Madya Ujung Pandang yang mempengaruhi ketersediaan air bersih maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Permasalahan Air Bersih di Kota Madya Ujung Pandang Pada Tahun 1971-1993”**.

1.2 Rumusan Masalah

Poin penting dalam suatu penelitian adalah adanya masalah yang ingin dijawab. Masalah merupakan akar dari hadirnya suatu penelitian. Masalah atau permasalahan hadir dari daya kritis atau analisis dalam menemukan suatu celah atau kesenjangan,



“Singkat Daerah Ujung Pandang”. *Harian Neraca*. Kamis 13 Oktober 1988,

“Sungai Jeneberang Membutuhkan Bendung Karet”. *Harian Ekonomi* umat 12 November 1993, 9.

maksudnya adalah ada perbedaan yang dilihat antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, apa yang diperlukan dan apa yang terpenuhi, dan yang sejenis dengan itu¹⁶.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan yang akan dibahas, yaitu:

1. Mengapa permasalahan air bersih terjadi di Kota Madya Ujung Pandang?
2. Bagaimana peran pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dalam mengatasi permasalahan air bersih di Kotamadya Ujung Pandang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian merupakan kajian suatu permasalahan untuk menemukan suatu jawaban. Maka dari itu penelitian harus memiliki batasan-batasan agar penelitian dapat memiliki fokus yang tepat, relevan dengan konteks penelitian serta menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dapat menjadi acuan serta dapat dipercaya. Dengan demikian penelitian ini memiliki dua batasan yaitu, batasan spasial dan batasan temporal.

a. Batasan spasial

Batasan spasial adalah batasan wilayah atau lokasi yang akan dikaji dalam penelitian sejarah atau kajian sejarah. Penelitian ini berada pada batasan spasial Kota Makassar yang merupakan salah satu kota yang mengalami pemekaran daerah sesuai dengan peraturan pemerintah.



n temporal

Arlina G, Latief. *Komponen Dasar Penelitian*. (Makassar: Diktat, 1990), 39.

Batasan temporal dalam tulisan ini adalah pada masa pemerintahan orde baru sekitar tahun 1971-1993. Penulis mengawali tahun 1971 sebagai awal periode karena pada tahun tersebut terjadi Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk rencana pembangunan Kota Makassar sekaligus terjadi perkembangan penduduk secara signifikan. Tahun 1993 menjadi akhir periode penulisan ini karena sampai pada tahun 1993 penyedia layanan air bersih bagi penduduk telah mampu memberikan solusi terkait permasalahan air bersih di Kotamadya Ujung Pandang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana permasalahan air bersih terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Mengetahui bagaimana peran pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dalam mengatasi permasalahan air bersih.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin



gai literatur guna menambah referensi bacaan tentang mengapa terjadi masalah air bersih di Kotamadya Ujung Pandang.

- c. Menambah pengetahuan tentang peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan air bersih di Kotamadya Ujung Pandang.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang relevan

Penelitian tentang krisis air atau ketersediaan air maupun mengenai air bersih telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya kajian Mohammad Oni Triono yang berjudul “*Access Clean Water in The Community of Surabaya Community Productivity*” tahun 2018, berbeda dengan apa yang ingin diteliti oleh penulis, penelitian lebih kearah akses terhadap air pada masyarakat Surabaya dengan melihat konteks masa sekarang. Dalam tulisan ini menyebutkan sumber air masyarakat Surabaya sebanyak 70% berasal dari PDAM.¹⁷ Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis memang dari batasan spasial dan temporal memang berbeda namun penulis dapat menjadikan tulisan ini sebagai acuan untuk melihat konteks akses terhadap air bersih nya pada Kota Makassar pada masa orde baru.

Kajian tentang saluran air bersih perpipaan yang ditulis Krisnanda Theo Primaditya dengan judul “Modernisasi Kota: Saluran Air Bersih Perpipaan di Jawa Masa Kolonial”. Penelitian ini memiliki konteks kolonial dalam melihat air bersih, penelitian ini memiliki fokus pada penyaluran air dan juga kelangkaan air bersih pada



Mohammad Oni T, “Access Clean Water in The Community of Surabaya ity Productivity”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. Vol. 3, No. 2, 2018, 143-

masa kolonial akibat pertumbuhan.¹⁸ Penulis menggunakan tulisan ini sebagai acuan untuk memberikan gambaran konteks masa kolonial dan kemudian dibandingkan dengan konteks yang ditulis oleh penulis yaitu kontemporer walaupun secara spasial dan kontemporer tidak sama dengan penelitian penulis.

Kajian yang dilakukan oleh Evi Duwi Agustriani dengan judul “Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pasuruan 1982-2004” tulisan ini membahas mengenai peranan pengelola air bersih di Kota Pasuruan dan juga dampak yang diberikan pada bidang sosial ekonomi dan sosial Kesehatan dan juga perkembangan pada sektor sarana infrastruktur air bersih, produksi air bersih, dan cakupan pelayanan air bersih¹⁹. Tulisan ini digunakan oleh penulis untuk dijadikan Sebagian acuan pada konteks Perusahaan penyedia air bersih, untuk membandingkan peranan pengelola air bersih di pasuruan dengan pengelola air bersih yang ada di Kota Makassar.

Kajian ini merupakan kajian yang fokus pada masyarakat tertinggal dan keterbatasan akses terhadap air bersih yang ditulis oleh Fadjri Alihar yang berjudul “Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang” kajian ini lebih terfokus pada dampak akses air akibat dari bencana alam air rob yang kemudian membuat masyarakat



¹⁸ Krisnando Theo P, “Modernisasi Kota: Saluran Air Bersih Perpipaian di Jawa lonial”. *Lembaran Sejarah*. Vol. 17, No. 2, 2021, 171-187.

Evi Duwi A, “Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota 1982-2004”. *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol. 5, No. 1, 2017, '8.

harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-hari nya²⁰. Tulisan ini digunakan penulis untuk dijadikan acuan untuk melihat apakah ada pengaruh komersialisasi air akibat dari ketersediaan air yang tidak merata tersalurkan di masyarakat pada periode yang ingin ditulis oleh penulis.

Kajian yang dilakukan oleh Anwar Firdaus Mutawally dan Dade Mahzuni yang berjudul “Air dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih Di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19-20)” dalam tulisan ini membahas mengenai satu permasalahan komprehensif akibat dampak dari krisis air yaitu konflik sosial antara penguasa, masyarakat dan tukang angkut air. Tulisan ini juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab kelangkaan air bersih serta bagaimana Upaya masyarakat dalam menanggulangi permasalahan air bersih pada masa kolonial Belanda. ²¹ penulis menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk melihat kemungkinan dampak konflik sosial yang terjadi pada masa kekurangan air pada masa orde baru di Kota Makassar.

Kajian yang dilakukan oleh Andi Achdian yang berjudul “Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota” tulisan ini berfokus pada dimensi pengetahuan sosiologi terkait protes terhadap layanan air bersih yang disebut sebagai politik air. politik air yaitu protes terhadap ketersediaan atau pelayanan mengenai air



²⁰ Fadjri Alihar, “Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang”. *Jurnal Iktan Indonesia*. Vol. 13, No. 1, 2018, 67-76.

Anwar F.M, Dade Mahzuni, “Air dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih Di Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19-20)”. *INNOVATIVE: Journal Of Ience Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, 5302-5315

pada masa pemerintahan Hindia Belanda.²² Tulisan ini dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana kepekaan masyarakat terhadap ketersediaan air pada masa orde baru di Kota Makassar akibat dari kurangnya pendistribusian air.

Kajian yang dilakukan oleh Ni Made Sukartini dan Samsubar saleh yang berjudul “Akses Air Bersih di Indonesia” tahun 2016. Tulisan tersebut mengkaji mengenai bagaimana akses air bersih yang ada di Indonesia. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana faktor pendorong terbentuknya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui pengaruh akses air bersih²³. Namun penelitian tersebut lebih melihat pengaruh tersebut dari konteks kekinian sedangkan apa yang ingin dikembangkan penulis ialah dari perspektif historisnya.

Artikel dalam jurnal yang dikaji oleh Ilham Daeng Makkelo yang berjudul “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar Pada Masa Orde Baru” tahun 2019. Tulisan ini fokus pada kajian perkotaan terkhusus Kota Makassar. Tulisan tersebut membahas mengenai bagaimana Modernitas di Kota Makassar pada masa orde baru dalam hal pengembangan dan Pembangunan kota.²⁴ Tulisan ini digunakan sebagai bahan acuan penulis untuk melihat konteks Kota Makassar pada

²² Andi achdian, “Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota”. *Jurnal Sejarah*, Vol. 3, No. 1, 2020, 98-104.

Ni Made Sukartini, Samsubar Saleh, “Akses Air Bersih di Indonesia”. *Jurnal Kuantitatif Terapan*. Vol. 9 ,No. 2, 2016, 89-98.

Ilham, “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar sa Orde Baru”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1, 2019,15-35.



masa orde baru, konteks Historis dan konteks pengembangan Kota pada masa orde baru di Kota Makassar.

Artikel dalam jurnal yang dikaji oleh Ilham Daeng Makkelo yang berjudul “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20” dalam tulisan ini membahas mengenai bagaimana Kota Makassar dirancang untuk menjadi sebuah Kota Modern namun terdapat suatu permasalahan tata Kelola perkotaan atas ketidakjelasan rencana penataan kota.²⁵ Tulisan ini digunakan penulis untuk melihat konteks kota modern dan apa yang menjadi permasalahan pada tata Kelola ruang kota pada masa orde baru di Kota Makassar. Tulisan ini dijadikan acuan karena permasalahan kota modern yang dimaksud dapat diartikan sebagai permasalahan yang kompleks.

Kajian yang dilakukan oleh Herlina Tarigan, Dkk, yang berjudul “Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho, Tabanan, Bali” artikel ini mengangkat kajian mengenai bagaimana pemanfaatan air di Bali²⁶. Jika dikaitkan dengan apa yang ingin ditulis penulis, penulis ingin melihat bagaimana polarisasi berkembang terhadap pemanfaatan air bersih untuk melihat konteks Masyarakat Kota Makassar dalam pemanfaatan air bersih.



Ilham, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-*al Sejarah*. Vol. 1, No. 2, 2018, 46-64.

Herlina Tarigan, et.al, “Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho, Bali”. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 31. No. 2, 2013, 143-159.

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Dahlan Bin Yalang yang berjudul “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 1976-1985” dalam tulisan ini hanya membahas mengenai atau fokus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar dan juga mengenai pengembangan Instalansi Pengelolaan Air²⁷. sedangkan penulis dengan tema sejarah kota dengan kajian krisis air untuk melihat bagaimana pemanfaatan air di Kota Makassar pada masa orde baru selain yang berasal dari PDAM.

Artikel dalam jurnal yang dikaji oleh Rikat L. Sofyan dan Muhammad Kholid Basyaiban yang berjudul Sejarah Pencemaran Sungai Jeneberang Sulawesi Selatan 2013-2021. Dalam artikel ini yang menjadi fokus utama yaitu permasalahan lingkungan yang merupakan isu yang banyak menjadi perbincangan sekaligus menjadi salah satu faktor terjadinya krisis air²⁸. penulis menjadikan artikel ini sebagai acuan untuk melihat permasalahan yang sama walaupun dengan konteks waktu yang berbeda.

Skripsi karya Afandi Syarif yang berjudul Perkembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Kota Makassar Tahun 1924-2006. Tulisan ini berfokus pada perkembangan PDAM secara keseluruhan mulai dari masa kolonial, jepang dan pasca kemerdekaan, yang menarik dari tulisan ini adalah bagaimana melihat perkembangan PDAM sebagai penyedia layanan air bersih menggunakan sudut pandang arkeologi dan juga berfokus

²⁷ Mohd Dahlan Bin Yalang, “*Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 1976-1985*”. (Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin,



Rikat L. Sofyan, Muhammad Kholid Basyaiban, “Sejarah Pencemaran neberang Sulawesi Selatan 2013-2021”. *Enviromental Pollution Journal*. Vol. 2022, 499-509.

pada benda atau materil dari sistem penyediaan air bersih²⁹. Sedangkan penulis ingin melihat bagaimana perkembangan PDAM sebagai layanan penyedia air bersih dan menjadikan skripsi ini sebagai acuan untuk melihat perkembangan sistem penyediaan air bersih di Kota Makassar untuk masyarakat.

1.6.2 Landasan Konseptual

Air adalah satu elemen penting dan menjadikan air sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan bagi kelangsungan hidup manusia. Secara logika dasar, manusia tidak mampu hidup jika tidak ada air. maka dari itu air mengambil peran penting dalam kelangsungan hidup manusia.³⁰ Dalam Sukartini dan Saleh menyebutkan bahwa air merupakan salah satu elemen penting, setiap orang setidaknya membutuhkan 20 liter air perhari dengan rincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari.³¹

Krisis berasal dari Bahasa Yunani (*xpion*) yang berarti keputusan. Qona'ah menjelaskan bahwa krisis memiliki ciri-ciri tergantung pada konteksnya, bisa mengarah pada keadaan fisik, SDM, produk andalan, konflik, energi, demo karyawan, proses hukum dan bagian keuangan. Kemudian jenis-jenis krisis menurut Otto

²⁹ Afandi Syarif, "*Perkembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Kota Makassar Tahun 1924-2006*". (Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas lin, 2007)

Mastiadi T, Muhammad Nizar R, *Air Bersih: Perkembangan Dan Teknologi annya*, (Malang: CV. IRDH, 2021), 1.

Sukartini dan Saleh, "Akses Air Bersih", 89-98.



Lerbinger dalam Qona'ah yaitu ada lima, krisis teknologis, krisis konfrontasi, krisis tindak kejahatan, krisis kegagalan, manajemen krisis dan krisis ancaman-ancaman lain.

Krisis air bersih merupakan suatu kondisi yang dimana tidak seimbangnya antara persediaan air dengan permintaan air akibat dari meningkatnya jumlah populasi. Semakin meningkatnya angka populasi, semakin bertambah juga permintaan akan air minum atau air bersih.³² Salah satu faktor kekurangan air memang terletak pada peningkatan jumlah penduduk, hal tersebut biasanya terjadi di daerah urban, adanya peningkatan penduduk secara signifikan yang mengakibatkan permintaan air bersih juga meningkat.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa berita dalam koran Kompas dan Harian Ekonomi neraca yang diakses melalui website Sidak Kominfo dan juga sumber yang berasal dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui website atau online. Koran dapat dijadikan sebagai sumber primer karena mampu menjelaskan masalah atau problem sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian sumber sekunder yang berupa buku dan beberapa artikel dalam jurnal yang sesuai dengan objek penelitian.



Museum. 2023. "*Krisis Ketersediaan Air Bersih*. Dinas Kebudayaan Jojga". daya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1527-krisis-ketersediaan-air-bersih diakses tanggal 4 Juni 2024.

2. Verifikasi Sumber

Verifikasi sumber dilakukan baik dalam aspek eksternal (bahan) maupun internalnya (isi dan informasi). Tidak semua bahan digunakan dalam merekonstruksi kejadian. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi pada setiap bahan. Upaya pertama dalam menyeleksi bahan adalah dengan kritik eksternal yang terkait dengan bahan sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk mengetahui posisi sumber sejarah, bahan dan waktu pembuatannya. Tahap kedua penulis melakukan seleksi secara internal. Kritik internal membutuhkan kecermatan dan daya kritis dalam memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam sumber.

3. Interpretasi

Setelah sumber terkumpul kemudian penulis melakukan sintesis atas sumber penelitian yang telah didapatkan yang berdasarkan arah penelitian penulis. Upaya ini lebih memudahkan dalam melakukan interpretasi (penafsiran) atas realitas sosial. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah fakta. Yang dimaksud dengan fakta adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik tentang suatu gejala yang ditanggapi dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu.

4. Penulisan Sejarah

Tahap akhir dari penulisan sejarah, dimana pada tahap ini penulis angkan fakta yang telah ditafsirkan secara tertulis dan dirangkai dalam sejarah dan deskriptif. Dalam penulisan ini di harapkan dapat menyajikan tulisan dengan objektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, sebagai bab pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan membahas mengenai gambaran umum Kotamadya Ujung Pandang sebagai kota pantai dan sebagai batasan wilayah penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai kondisi geografis dan administratif, kondisi penduduk dan pola pembangunan Kotamadya Ujung Pandang yang mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi penduduk.

Bab III, akan membahas mengenai sumber air bersih dan bagaimana keterbatasan akses terhadap air bersih yang dialami oleh penduduk Kotamadya Ujung Pandang.

Bab IV, akan membahas mengenai peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan air bersih yang dialami oleh penduduk Kotamadya Ujung Pandang.

bagaimana masyarakat Kota Makassar memperoleh air bersih.

Bab V, akan berisi kesimpulan yang merupakan kesimpulan hasil yang diperoleh dari bab satu sampai bab empat.



BAB II

UJUNG PANDANG SEBAGAI KOTA PANTAI

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi Kotamadya Ujung Pandang sebagai kota pantai sebelum dan setelah pemekaran yang dilakukan pada tahun 1971. Pembahasan dalam bab ini akan meliputi kondisi geografis dan administratif serta kondisi penduduk Kotamadya Ujung Pandang yang menjadi salah satu akibat terjadinya permasalahan air bersih yang dialami penduduk kota. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai pola pembangunan Kotamadya Ujung Pandang sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan air bersih.

2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Madya Ujung Pandang

Kotamadya Ujung Pandang adalah kota yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Dengan begitu, Kotamadya Ujung Pandang termasuk salah satu dari banyaknya kota pantai yang ada di Indonesia. Kota ini juga merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara.¹

Penyematan “kota pantai” untuk Kotamadya Ujung Pandang karena faktor kondisi geografis Kotamadya Ujung Pandang yang didukung oleh keberadaan laut dan



¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1964 Tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan ngkat I Sulawesi Tengah dan daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan h undang-undang no. 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat si Utara Tengah dan daerah tingkat i Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran hun 1964 no. 7) menjadi Undang-Undang.

aktivitas kehidupan pelayaran yang juga di sokong oleh sarana dan prasarana, dan munculnya sebuah pasar. Selain itu, hadirnya Kotamadya Ujung Pandang sebagai kota pantai juga dipengaruhi oleh faktor ekologisnya. Secara ekologis Kotamadya Ujung Pandang diapit oleh dua aliran Sungai yaitu, Sungai Jeneberang² dan Sungai Tallo.³ Debit air Sungai Jeneberang 1-2 m³/detik dan debit Sungai Tallo pada musim kemarau kira-kira 0,5 m³/detik.⁴

Kotamadya Ujung Pandang memiliki kondisi geografis dan iklim yang menarik. Walaupun kota ini di sematkan sebagai kota pantai, Kotamadya Ujung Pandang pada dasarnya memiliki iklim tropis dengan rata-rata 22⁰-32⁰ C dan hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung antara bulan mei hingga September, sedang musim hujan berlangsung bulan Oktober hingga April. Curah hujan di Kotamadya Ujung Pandang pada umumnya relatif tinggi, yaitu 2000-3000 mm pertahun dengan hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Kemudian untuk arah angin, kota madya ujung pandang memiliki arah angin 210⁰ 15 Bujur timur atau arah Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 5,1 km dak kelembapan antara 73%-

² Sungai Jeneberang dalam penelitian akan sangat penting karena menyangkut kebutuhan mengenai air bersih terhadap penduduk, dikarenakan mulai zaman pemerintahan Hindia-Belanda, pasokan air untuk Kotamadya Ujung Pandang berasal dari Sungai Jeneberang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jaringan pipa yang di bangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang bersumber dari Sungai Jeneberang.



Darmawan Mas'ud Rahman, et.al. *Pertumbuhan Kota Pantai Makassar*. andang: Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. 1994), 8-9.

Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1992. (Badan Pusat Statistik ya Ujung Pandang).

86%.⁵ Walaupun suhu cenderung konstan namun ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh pola curah hujan musiman. Hal tersebut tentunya penting karena kondisi iklim pada tahun tersebut berimplikasi langsung pada pasokan air bersih masyarakat terutama dalam menghadapi pendistribusian air bersih yang belum merata pada waktu itu. Dalam JICA juga dijelaskan bahwa rata-rata curah hujan bulanan dan suhu harian pada periode 1974–1983. Secara umum, total curah hujan tahunan mencapai 3.086 mm dengan variasi yang cukup signifikan setiap bulannya. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Januari (750 mm), diikuti Desember (579 mm) dan Februari (588 mm), yang menandakan periode musim hujan. Sebaliknya, curah hujan terendah tercatat pada Agustus (7 mm), diikuti September (20 mm) dan Juli (47 mm), yang menggambarkan musim kemarau.⁶

Pada dasarnya daerah yang tumbuh sebagai kota pantai, Kotamadya Ujung Pandang sebagian besar berada di daerah dataran rendah dan hanya sebagian kecil yang berada di dataran tinggi. Dataran rendah Kotamadya Ujung Pandang melebar dari tepi pantai sebelah barat yang melebar ke arah timur sekitar 20 kilo meter dan memanjang dari Selatan ke utara (sebelum dimekarkan). Daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar menjadi pusat pertumbuhan permukiman, perdagangan, dan



Anwar Arifin. *Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966*. (Tangerang: Pustaka Irvan, 2019), 15

JICA, *The Study on Water Supply System for Ujung Pandang City*, 1985. 2-7

pemerintahan, karena aksesibilitasnya lebih mudah dibandingkan daerah dataran tinggi.⁷

Secara administratif, Kotamadya Ujung Pandang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten, seperti Kabupaten Gowa di sebelah Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat. Pada tahun 1971 Kotamadya Ujung Pandang memiliki luas wilayah 175,77 km² yang disebabkan oleh perubahan batas wilayah yang diatur dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 51 tahun 1971. Dengan begitu memutuskan daerah Kotamadya Ujung Pandang diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan.⁸



⁷ Citra Kota Makassar Dalam Arsip. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Akhmad Akbar Abdullah. “Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya dalam Wilayah Kota Makassar 1971”. *Jurnal Patingalloang*. Vol. 5 N0. 4,

Pada tahun 1971, setelah Kotamadya Ujung Pandang diperluas (lihat gambar 2.3) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal peraturan pemerintah, kota ini akhirnya terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Kecamatan Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang dan Biringkanaya.⁹



Gambar 2. 1 Peta Kotamadya Ujung Pandang tahun 1984
(Sumber: tanahair.indonesia.go.id.)



Nur Kasim. *Sejarah dan Perkembangan Pemerintah Kota Makassar*. Website. akses pada Minggu, 27 April 2025. Pukul. 01.40.

Pada tahun 1970, sebelum Kotamadya di perluas pada tahun 1971, Kotamadya Ujung Pandang disebut dengan nama Kota Makassar yang dahulunya hanya memiliki luas 21 km2 dan terdiri atas 8 kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Tanah, Ujung Pandang, Wajo, Makassar, Bontoala, Mariso, Tallo dan Mamajang yang meliputi 42 kelurahan.¹⁰ Namun setelah dikeluarkannya PP N0.51 Tahun 1971¹¹ tentang perubahan batas-batas wilayah, batas wilayah Kotamadya Ujung Pandang kemudian berubah. Kebijakan tersebut menyusul akibat dari rencana Pembangunan Kotamadya Ujung Pandang atau Makassar Plan.¹²

¹⁰ Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1971(Badan Pusat Statistik)

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.



H.M Dg. Patompo. *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Pembangunan)*. (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung 1976), 30.



r 2. 2 Peta Kotamadya Ujung Pandang tahun 1970 sebelum mengalami pemekaran
(Sumber: oldmapsonline)



2.2 Kondisi Penduduk Kota Madya Ujung Pandang

Kotamadya Ujung Pandang dalam rentan tahun 1971-1993 menunjukkan perubahan kondisi demografis yang cukup signifikan, salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi kondisi penduduk itu sendiri. Penduduk merupakan orang yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan elemen penting dalam menunjang perkembangan kota.¹³ Diseluruh wilayah Indonesia, perkembangan penduduk bukan suatu hal yang baru, peningkatan jumlah penduduk sudah barang tentu terjadi disetiap wilayah di Indonesia termasuk Kotamadya Ujung Pandang. Sejak jaman Kerajaan, Pemerintahan Hindia Belanda hingga hari ini Kotamadya Ujung Pandang terus mengalami peningkatan Jumlah penduduk.¹⁴ Dengan peningkatan penduduk yang terbilang signifikan, peranan pemerintah juga akan menjadi sangat penting dalam konteks kesejahteraan penduduk.

Melihat dari konteks pasca kemerdekaan, kondisi penduduk Kotamadya Ujung Pandang, sebelum melakukan perluasan wilayah, pada tahun 1950 sampai 1970, terjadi peningkatan jumlah penduduk dari 144.979 jiwa menjadi 432.242 jiwa. Dalam kurun waktu 20 tahun jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang bertambah kurang lebih 200 jiwa yang tersebar kebeberapa kecamatan.¹⁵ Pada tahun 1971, setelah mengalami perluasan, perkembangan jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang mengalami



Edward L. Poelinggomang. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan dan Maritim*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2016), 173.

Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, 173.

Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1978 (Badan Pusat Statistik)

perubahan yang cukup signifikan. Dalam setahun, penduduk Kota Madya bertambah sekitar 121.630 jiwa atau pada tahun 1971 jumlah keseluruhan penduduk mencapai 553.872.¹⁶ Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentu saja permintaan akan kebutuhan penduduk juga akan meningkat, seperti halnya tempat tinggal dan fasilitas lainnya termasuk mengenai kebutuhan air bersih.

Pada akhir desember tahun 1992 tercatat sebanyak 1.000.328 jiwa yang terdiri dari 501.077 laki-laki dan 499.251 jiwa Perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam 11 wilayah Kecamatan di Kotamadya Ujung Pandang yaitu, Kecamatan Mariso 58.901 jiwa, Mamajang 71.954 jiwa, Tamalate 211.480 jiwa, Makassar 99.055 Jiwa, Ujung Pandang 40.456 jiwa, Wajo 47.023 jiwa, Bontoala 68.388 jiwa, Ujung Tanah 47.906 Jiwa, Tallo 117.711 Jiwa, Panakkukang 159.692 Jiwa, dan Biringkanaya 77.702 jiwa.¹⁷ Kepadatan penduduk di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun tersebut adalah 5.691 km². Perkembangan penduduk Kotamadya Ujung Pandang dalam kurun waktu 1971-1993 dapat dilihat dalam table berikut:



Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1971(Badan Pusat Statistik)
Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1992. (Badan Pusat Statistik
ya Ujung Pandang).

Tabel 2. 1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang tahun 1970-1993

Jumlah Penduduk	Tahun
432.242 Jiwa	1970
553.872 Jiwa	1971
561.328 Jiwa	1972
564.482 Jiwa	1973
575.771 Jiwa	1974
561.501 Jiwa	1975
596.876 Jiwa	1976
602.422 Jiwa	1977
602.916 Jiwa	1978
633.985 Jiwa	1979
708.465 Jiwa	1980
712.219 Jiwa	1981
717.585 Jiwa	1982
736.159 Jiwa	1983
748.611 Jiwa	1984
753.362 Jiwa	1985
778.581 Jiwa	1986
806.129 Jiwa	1987
821.957 Jiwa	1988
822.013 Jiwa	1989
822.013 Jiwa	1990
971.947 Jiwa	1991
1.000.328 Jiwa	1992
1.011.054 Jiwa	1993

Sumber: Kumpulan data penduduk dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dalam angka dan Kotamadya Ujung Pandang dalam Angka 1972-1997)



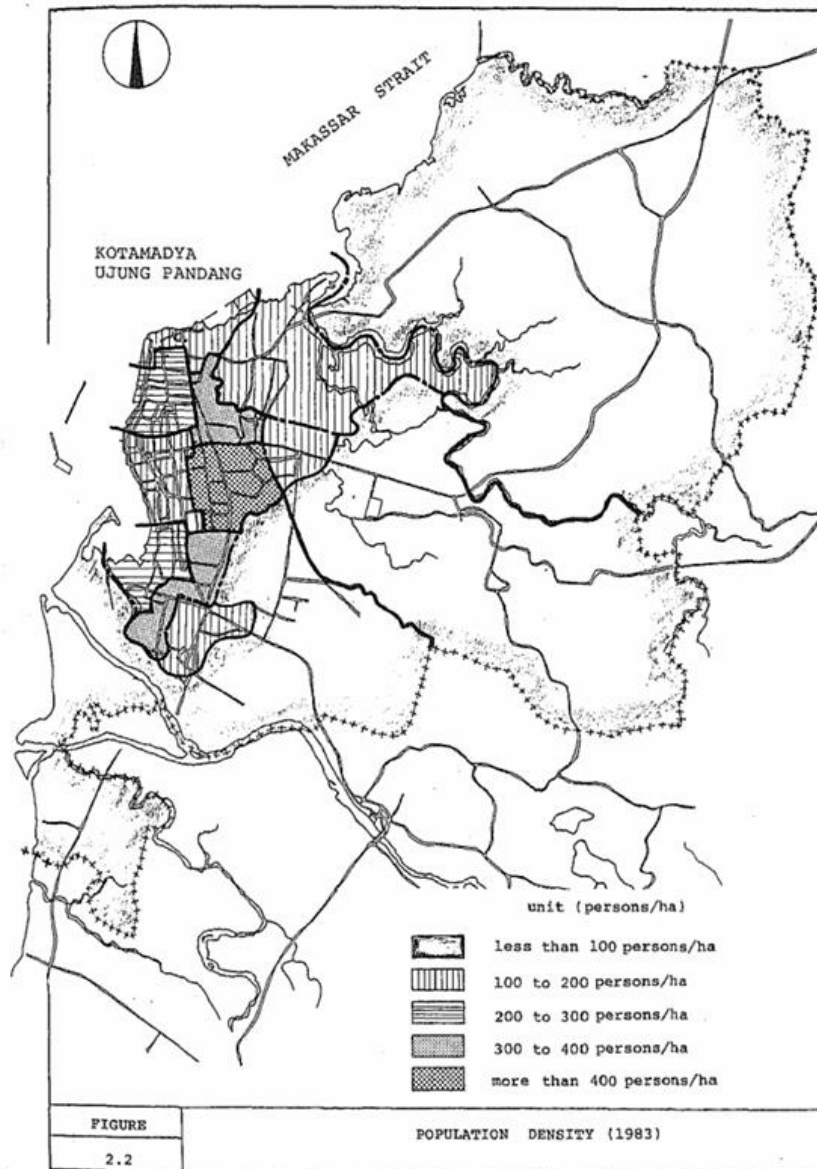
Perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan, mengakibatkan dampak terhadap kesejahteraan penduduk, contohnya dalam pemenuhan kebutuhan penduduk seperti air bersih. Pada tahun 1972, dengan penduduk berjumlah 561.328¹⁸ jiwa dengan jumlah kepala keluarga 93.368 hanya kurang lebih 2000 kepala keluarga yang menikmati air bersih yang di kelola oleh pemerintah, hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam menikmati ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi seperti itu terus dirasakan oleh penduduk Kotamadya Ujung Pandang, pada tahun 1993 dengan jumlah penduduk 1.011.054¹⁹ Jiwa dengan sekitar 200.000 ribu kurang lebih kepala keluarga, hanya 40.967 total kepala keluarga yang menikmati air bersih. Dengan kondisi seperti itu, sebagian besar penduduk hanya mengandalkan air sumur dalam mencukupi kebutuhan air mereka.

Untuk memahami permasalahan air bersih yang terjadi pada masa itu, terkait jumlah penduduk dan wilayah penyaluran air bersih, perlu juga diketahui sebaran penduduk perwilayah atau kepadatan penduduk di Kotamadya Ujung Pandang. Kepadatan penduduk Kotamadya Ujung Pandang menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana distribusi penduduk di berbagai wilayah di Kotamadya



Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1972 (Badan Pusat Statistik)
Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1997 (Badan Pusat Statistik)

Ujung Pandang, sekaligus menunjukkan wilayah-wilayah yang paling rentan menghadapi tekanan kebutuhan air bersih.



2-11



2.3 Peta kepadatan penduduk Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1983 oleh JICA

r: JICA, *The Study on Water Supply System for Ujung Pandang City*, 1985)

Peta ini memperlihatkan kepadatan penduduk di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1983. Sebagian besar wilayah yang berada di pusat kota, khususnya yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar di bagian barat, memiliki kepadatan yang sangat tinggi, yakni lebih dari 400 jiwa per hektar. Wilayah dengan kepadatan 300–400 jiwa per hektar juga terpusat di sekitar pusat kota, hal itu menandakan adanya aktivitas ekonomi dan pemukiman yang padat. Sementara itu, area di pinggiran kota, khususnya yang mengarah ke timur dan selatan menuju Kabupaten Gowa serta utara ke arah Kabupaten Maros, menunjukkan kepadatan yang jauh lebih rendah, bahkan ada yang kurang dari 100 jiwa per hektar. Peta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sebaran penduduk, di mana wilayah inti kota mengalami tekanan demografis yang besar, sedangkan wilayah pinggiran masih relatif jarang penduduk.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar, seperti yang berada di kawasan pantai diakibatkan oleh tingginya permintaan akan tempat tinggal dan fasilitas lainnya yang menunjang kebutuhan hidup seperti halnya air bersih. Peningkatan jumlah penduduk ini sebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah kedatangan para pedagang, pengusaha, dan kaum cendekiawan di kota tersebut, perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari kerja, adanya penduduk desa yang ingin menuntut ilmu di kota dan sebagainya.²⁰ Penduduk yang paling banyak mendiami

Kotamadya Ujung Pandang merupakan Suku Bugis dan Suku Makassar, adapun suku



Mattulada. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. (Makassar: Ombak. 2011), 12.

lain yang juga ikut mendiami Kotamadya Ujung Pandang adalah Toraja dan Mandar. Juga terdapat Suku yang berasal dari luar Pulau Sulawesi yaitu seperti Ambon, Timor, Bima, Buton dan Cina. Hal tersebut tentunya menciptakan atmosfir perkotaan yang indah akan keanekaragaman.²¹

Penduduk Kotamadya Ujung Pandang adalah orang yang memiliki sifat-sifat demokratis dan tentunya menghargai kekeluargaan. Tidak hanya itu, penduduk Kotamadya Ujung Pandang juga dikenal sebagai orang yang ramah, sangat menghargai satu sama lain. Selain itu, penduduk Kotamadya Ujung Pandang adalah orang yang memiliki sifat keras kepala. Dengan tubuh sedikit langsing, berotot dan warna kulit sawomatang dan memiliki nada suara agak keras dan bernada tinggi, membedakan orang makassar dengan orang bugis karena memiliki nada bicara lembut, seperti contohnya orang bone.²²

Sebagai kota pantai sebagian besar penduduk Kotamadya Ujung Pandang memiliki mata pencaharian sebagai pelaut dan juga menjadi petani serta buruh²³. Penduduk Kotamadya Ujung Pandang keadaan akhir tahun 1992 sebanyak 1.000.328 jiwa, tercatat dari jumlah tersebut terdapat kelompok umur 10 tahun keatas sebanyak

²¹ Abu Hamid, et.al. *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Protes Adaptasi Sosial*. (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), 39-40.



J.R. Chaniago. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia Peranan Lokal Dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur* (Jakarta: Universitas Gadjah Mada. 2002), 83-86.

Chaniago, *Menuju Negara Kesatuan*, 83-86.

782.670. penduduk umur 10 tahun keatas tersebut merupakan penduduk Angkatan kerja atau yang telah bekerja dan penduduk bukan Angkatan kerja merupakan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Jika diperincikan, jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja pada keadaan akhir tahun 1992 sebanyak 488.542 jiwa. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi kesejahteraan penduduk Kotamadya Ujung Pandang karena orang yang sedang mencari pekerjaan lebih banyak dibandingkan orang yang telah bekerja.²⁴

2.3 Pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang

Pembangunan merupakan konsekuensi logis dari apa yang dianggap sebagai perubahan dalam lanskap perkotaan. Dalam ilmu sosiologi, pembangunan dikenal dalam dua teori besar (*grand theories*). Pertama, teori dari Max Weber yang menganggap nilai-nilai yang ada didalam masyarakat menjadi pemicu terjadinya perubahan. Teori kedua lahir dari pemikiran Karl Marx yang memandang bahwa akar perubahan berlandaskan aspek materialistik.²⁵ Secara sederhana, pembangunan adalah implementasi program dan proyek. Pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan perkembangan. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan untuk menuju ke tataran kondisi kurang baik menjadi lebih baik atau dari kondisi tidak ada menjadi ada. Sementara itu, perkembangan adalah usaha



Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1992. (Badan Pusat Statistik ya Ujung Pandang).

Suaib. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Indramayu: Penerbit 23), 2

melakukan perbaikan dari kondisi yang sudah baik sekalipun menuju ke kondisi yang jauh lebih baik.²⁶

Dengan demikian, salah satu kota yang bernaung di pulau Sulawesi bagian Selatan, Kota Madya Ujung Pandang merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan Pola Pembangunan yang pesat, khususnya di masa pemerintahan Walikota Patompo. Pola Pembangunan lima tahun Kota Madya Ujung Pandang dimaksudkan untuk menyelesaikan atau memiliki tujuan utama memberantas Kemiskinan, Kemelarat, Kebodohan atau yang dikenal dengan program 3K.²⁷ Program itu bukan tanpa alasan, Patompo berpendapat bahwa dengan penduduk yang miskin, melarat, dan bodoh akan mustahil dilakukan Pembangunan.

Pada masa pemerintahan Walikota Patompo pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang dibentuk. Hal tersebut dilakukan dengan melihat tinjauan pertumbuhan perkotaan sejak zaman Belanda hingga masa kekacauan politik di Sulawesi Selatan Tenggara, secara khusus Kota Madya Ujung Pandang. Demikian juga sekaligus untuk menyongsong Pelita (Pembangunan Lima Tahun) 1 tahun 1968-1973. Jika dilihat, terdapat penyesuaian program mengenai Pola Pembangunan antara Pemerintah Daerah Kota Madya Ujung Pandang dan Program Nasional PELITA 1.²⁸ Namun, Pola

²⁶ Suaib, *Pembangunan dan pemberdayaan*, 3

H.M Dg. Patompo. *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Pembangunan)*. (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung 1976), 27.

Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir*, 30.



Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang memegang prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, dan Sinkronisasi. Hal itu dimaksudkan agar Pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang dan Program nasional PELITA 1 dapat berjalan secara beriringan atau berkesinambungan satu sama lain.²⁹

Kemudian pada tahun 1970an, Pemerintah Daerah Kota Madya Ujung Pandang mengakselerasi pelaksanaan program 3K guna mencapai sasaran-sasaran pemangunan selanjutnya. Sasaran-sasaran Pola Pembangunan pada masa pemerintahan Walikota Patompo dibagi ke dalam dua sasaran yaitu, sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek meliputi 6 hal yaitu, cukup lapangan kerja, cukup perumahan, cukup air/minum dan listrik, cukup Pendidikan/Kesehatan serta cukup perhubungan dan cukup hiburan/olah raga. Untuk sasaran jangka panjang, Walikota Patompo memiliki tekad untuk melahirkan Kota Madya Ujung Pandang sebagai Kota 5 Dimensi, yang terdiri dari Kota Dagang, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Akademi dan Kota Pariwisata. Dengan tekad yang cukup besar untuk Pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang, Walikota Patompo yakin dalam waktu yang relatif singkat, program Kota 5 Dimensi akan segera terealisasi.³⁰

Sejalan dengan Pembangunan di Kota Madya Ujung Pandang, peningkatan dari sektor lain pun turut mewarnai perubahan Kota Madya Ujung Pandang. Salah



Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir*, 30

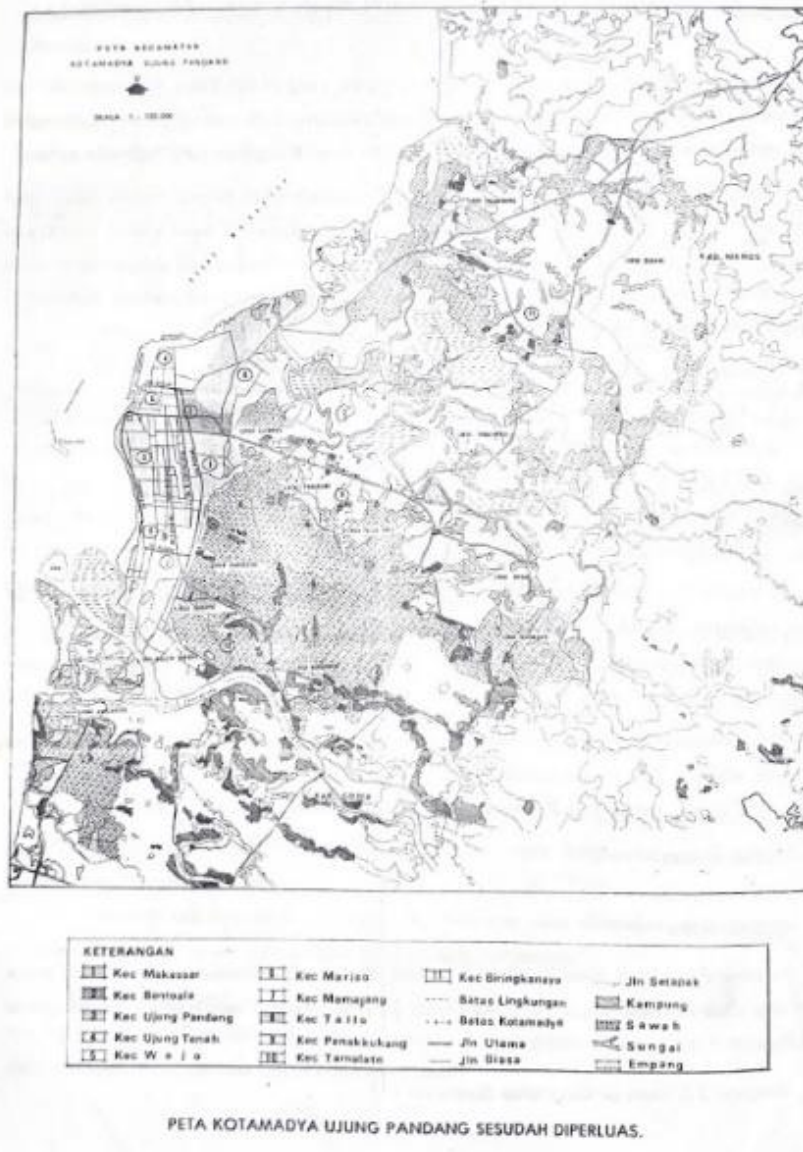
Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir*, 31.

satunya pertumbuhan penduduk yang meningkat. Pada tahun 1960an-1970 jumlah penduduk Kota Madya Ujung Pandang mengalami peningkatan dari 384.159 Jiwa menjadi 432.242³¹. Melalui master plan fisik Walikota Patompo (*Patampo Plan*), Kota Makassar yang pada tahun 1970 luasnya hanya mencapai 21 KM², kemudian diusulkan untuk diperluas. Pada tahun 1971, berkat perjuangan yang telah dilakukan, diterbitkan PP N0.51 Tahun 1971³² yang memutuskan bahwa Kota Madya Ujung Pandang akan diperluas menjadi 215 KM², sekaligus mengubah nama dari Kota Makassar menjadi Kota Madya Ujung Pandang.

³¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 1971

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang n Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten aros, dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi





Gambar 2. 4 Peta Kotamadya Ujung Pandang setelah diperluas tahun 1970
(Sumber: Rahasia Menyingkap Tabir kegelapan, H. M. Dg. Patompo)

Selain beberapa poin di atas, terdapat beberapa program penting yang menjadi
 a. dalam pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang. Adapun,
 Patompo memberi perhatian pada penduduk yang berada di kampung-



kampung, lorong-lorong, dan tempat terpencil yang sulit diakses. Sebagai walikota yang menaruh perhatian lebih kepada Pembangunan dan peningkatan taraf hidup, Pemerintah daerah Kota Madya Ujung Pandang meinisiasi program Gerakan Masuk Kampung (GMK). Program ini sekaligus berfungsi sebagai pelengkap dari implementasi-implementasi seluruh program yang ada atau dapat diartikan sebagai bentuk pemerataan Pembangunan.³³

Pola Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang pada masa pemerintahan Walikota Patompo dikenal dengan nama *Panakkukang Plan*. *Master plan* tersebut ditetapkan dan berlaku menyeluruh untuk bagian Kota Madya Ujung Pandang. Rancangan Pembangunan tersebut memiliki beberapa kawasan-kawasan strategis atau *strategic site plan* yaitu, Kawasan Industri, Kawasan Pemerintahan, Kawasan Rekreasi, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Perwismaan dengan total luas wilayah 4.000 Ha. Wilayah ini dibangun dengan dua fungsi utama yaitu, sebagai pusat perkantoran sekaligus sebagai wilayah pemukiman penduduk kelas menengah-elit.³⁴



Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir*, 31-32.
Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir*, 31-32.